

# Pengaruh Faktor Keprilakuan Organisasi terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Ayu Tinis Khaulia<sup>1\*</sup>, Dwi Cahyono<sup>2</sup>, Didik Eko Pramono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember, Jawa Timur, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 19 August 2019  
Received in revised form  
16 September 2019  
Accepted 15 October 2019  
Available online 30  
November 2019

### Kata Kunci:

Dukungan bos, Kejelasan  
Tujuan, Pelatihan dan  
Sistem Akuntansi Keuangan  
Daerah

### Keywords:

Boss support, Clarity of  
Purpose, Training and  
Regional Financial  
Accounting System

## ABSTRAK

Survei awal yang dilakukan oleh penulis adalah layanan bisnis mikro, departemen ourism dan layanan sosial di kabupaten Jember, dari mana diketahui bahwa kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah masih belum optimal. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan mempengaruhi kegunaan dari sistem akuntansi keuangan regional. Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sampel yang diambil adalah sampel responden yang sesuai dengan kriteria dan sampel yang dibutuhkan adalah 106 responden dari 53 objek. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Ada pengaruh positif dari faktor pelatihan terhadap manfaat SAKD. 2. Ada pengaruh positif dari kejelasan tujuan penggunaan SAKD. 3. Ada pengaruh positif dari faktor dukungan superior untuk penggunaan SAKD. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor perilaku seperti pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan memiliki peran penting untuk meningkatkan kinerja staf administrasi dalam memahami lebih lanjut tentang penggunaan SAKD. Sehingga sugesti bagi CPNS dan agensi untuk lebih meningkatkan pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan untuk meningkatkan penggunaan SAKD.

## ABSTRACT

The initial survey conducted by the author is the micro business service, ourism and social services department in Jember district, from which it is know that the usefulness of the regional financial accounting system is still no optimal. So the purpose of this study is to analyze whether training, clarity of purpose and superiors support influence the usefulness of the regional financial accounting system. The population of this study is all SKPD in Jember district, east java province. The sample taken is a sample of respondents who are appropriate from the criteria and the sample needed is 106 respondents from 53 objects. The method of data collection uses a questionnaire. The data analysis method used is descriptive analysis. The result of these studies indicate that: 1. There is positive influence from training factors on the usefulness of SAKD. 2. There is a positive influence from the clarity of the purpose of the use of SAKD. 3. There is a positive influence from the factor of superior support for the use of SAKD. Based on the result of the study, it can be concluded that behavioral factors such as training, clarity of purpose and superiors support have an important role to improve the pervormance of administrative staff in understanding more about the use of SAKD. So that suggestioms for employess and agencies to further improve training, clarity of purpose and superiors support to increase the use of SAKD.

\* Corresponding author.

E-mail addresses: [khauliaat4@gmail.com](mailto:khauliaat4@gmail.com) (Ayu Tinis Khaulia)

## 1. Pendahuluan

Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek – aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Aspek – aspek tersebut yaitu pengaruh organisasi terhadap manusia dan pengaruh manusia terhadap organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Kayati : 2016) dalam bukunya (Timotius : 2018). Penerapan SAKD merupakan bagian dari tujuan organisasi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Akuntansi adalah suatu sistem. Menurut PP 71 tahun 2010 akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem – subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Menurut permendagri nomor 64 tahun 2013 standar akuntansi pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tahap – tahap dalam siklus akuntansi dimulai dari bukti transaksi, jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo, membuat laporan keuangan, jurnal penutupan, dan neraca setelah penutupan. Laporan keuangan, sesuai dengan siklus akuntansi, setelah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian disusun laporan – laporan keuangan dengan mengambil data neraca saldo setelah penyesuaian. Maka buatlah: Neraca, laporan Realisasi Anggaran (LRA) , Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas laporan Keuangan (CALK).

Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah yaitu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No.59/PMK.6/205 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka system akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah daerah diatur dengan Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan atas permendagri No. 13 tahun 2006 adalah pasal 232 yang isinya mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah agar dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang sesuai standart dan berkualitas.

Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 yang kini telah diperbaharui oleh Permendagri No.21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer. Proses akuntan tersebut akan didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar dan jika diperlukan maka ditambah dengan buku besar pembantu, sehingga terlihat jelas bahwa sistem akuntansi sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa factor organisasional seperti pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan, berpengaruh positif terhadap implementasi suatu inovasi system maupun perubahan model akuntansi manajemen (Latifah dn Sabeni : 2007).

Perubahan sistem akuntansi Pemerintahan Daerah, (Yulistia dkk : 2017) terdapat karakteristik pelaksanaan pemerintah yang baik yaitu :

### 1. Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari setiap kegiatan penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

### 2. Keterbukaan/Transparansi

Merupakan suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui apa yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah termasuk berbagai prosedur, serta keputusan – keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan public.

### 3. Ketaatan pada Hukum

Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah dengan demikian dengan ketaatan social, ketaatan social manakala tidak

dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi – sanksi social yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan,

#### 4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana konsekuensi demokrasi adalah penyediaan ruang bagi partisipasi public yang seluas – luasnya. Partisipasi public dalam proses pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat. Di Negara – Negara demokrasi, partisipasi warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim. Partisipasi public dalam proses kebijakan tidak hanya merupakan cermin demokrasi yang paling nyata dalam kehidupan sehari – hari melainkan juga bermanfaat bagi pemerintah.

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 terdiri dari:

1. Laporan realisasi anggaran disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing – masing diperandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunal SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKP, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan operasional disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan –LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan arus kas disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan perubahan ekuitas disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
7. Catatan atas laporan keuangan disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat berguna untuk mengelola dana secara transparan, ekonomis, efektif efisien, dan akuntabel. Indikator yang digunakan dalam mengukur kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut (Kayati : 2016) adalah sebagai berikut:

1. *Validity*, informasi yang dihasilkan dalam sistem akuntansi yang digunakan memiliki kandungan akurasi yang tinggi.
2. *Reliability*, informasi yang dihasilkan dalam sistem informasi adalah informasi yang dapat dipercaya.
3. *Efisien*, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat menghemat pengguna biaya.
4. *Efektif*, melalui sistem informasi yang digunakan anggota organisasi dapat memanfaatkan waktu secara optimal.

Menurut (Robbins, 2011) Perilaku Organisasi juga merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Menurut (Ahmad : 2015), faktor organisasi dalam implementasi sistem ada tiga aspek, meliputi dukungan atasan, kejelasan tujuan, dan pelatihan. Dukungan Atasan diartikan sebagai keterlibatan menejer dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan, Kejelasan Tujuan didefinisikan sebagai kejelasan dari sasaran dan tujuan digunakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di semua level organisasi, dan Pelatihan merupakan suatu usaha pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem.

Pelatihan berkaitan dengan implementasi, desain dan penerapan SAKD yang dapat memberikan mekanisme bagi pengguna untuk memahami dan menerima dasar dai SAKD. Menurut (Febriana : 2016), untuk mencapai program pelatihan, maka harus memperhatikan sasaran yang jelas, memakai tolak ukur terhadap hasil yang dicapai. Pelatihan ditunjukkan kepada semua karyawan, baik karyawan lama ataupun karyawan baru, bagi karyawan baru pelatihan dilakukan guna meningkatkan wawasan karyawan untuk dapat mengerti pengoperasian peralatan atau mesin, kepada siapa mereka bertanggungjawab, dan

bagaimana cara mengatasi konflik dalam organisasi, sedangkan bagi karyawan lama gunanya untuk lebih meningkatkan hasil pekerjaan baik sekarang atau yang akan datang, serta dapat memperbaiki efisiensi dan efektifitas kerja karyawan untuk mencapai tujuannya.

Kejelasan tujuan adalah penting untuk diingat bahwa orang – orang di dalam organisasi bertanggung jawab untuk menentukan sasaran dan menetapkan tujuan. Orang – orang dalam organisasi juga bertanggung jawab atau pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Fase penetapan tujuan dan perencanaan penuh dengan kekurangan dalam perilaku. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan dari anggota organisasi yang dominan, yang secara kolektif mempunyai kendali yang mencakupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atas arahnya tertentu atau untuk menahannya dari yang lain. Kejelasan tujuan dalam organisasi dapat menentukan suatu keberhasilan sistem, karena individu dengan suatu kejelasan tujuan, akan lebih dapat memahami bagaimana cara mereka dalam mencapai target untuk mencapai tujuan dengan menggunakan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki.

Menurut Nasution 1994 dalam (Latifah : 2007) . Dukungan atasan dapat diartikan sebagai keterlibatan atasan dalam kemajuan proyek dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Dukungan manajemen puncak dalam suatu inovasi sangat penting dikarenakan adanya kekuasaan manajer terkait dengan sumber daya. Atasan dapat focus terhadap sumber daya yang diperlukan, tujuan dan inisiatif strategi yang direncanakan apabila atasan mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan efektivitas suatu sistem.

Ciri-ciri atasan yang baik dapat memberikan dukungan kepada karyawannya dalam suatu organisasi adalah: 1) Mempunyai kemampuan melebihi orang lain dan harus mempunyai inisiatif untuk memberikan masukan yang baik kepada karyawannya, 2) Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, 3) Bekerja keras sehingga dapat memberikan contoh atau motivasi kepada karyawan, 4) Pandai bergaul dan dapat mengenal semua karyawan dengan baik, 5) Memberikan contoh bekerja dan semangat kepada bawahan atau karyawan, dan 6) Memiliki rasa integritas dan rasa bersatu padu dengan kelompok yang ada dalam organisasi.

Penelitian yang dilakukan (Yulistia dkk : 2017) pada pemerintah daerah Sumatera Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan hubungan positif antara dukungan atasan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, namun hasil yang berbeda ditunjukkan dari hubungan negative antara pelatihan dengan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hal yang sama juga dilihat dari hasil pengujian kejelasan tujuan dengan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, karena nilai critical ratio (CR) menunjukkan nilai yang negative.

Penelitian oleh (Caecilia Henny Setya Wati dan semuel Batlajery : 2015) tentang Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kongnitif Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Merauke yang menunjukkan bahwa hanya pengguna dukungan atasan dan konflik kongnitif memiliki pengaruh positif dan kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Pelatihan dan kejelasan tujuan memiliki pengaruh positif pada konflik kongnitif.

Penelitian oleh (Novie Astuti : 2017) tentang Pengaruh Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur. Menunjukkan hasil bahwa dari faktor organisasi yang di uji fektor keprilakuan organisasi yang meliputi hanya dukungan atasan dan kejelasan tujuan yang berpengaruh positif pada sistem akuntansi keuangan daerah sedangkan pelatihan berpengaruh negatif.

Objek yang akan diteliti dikabupaten jember yang diketahui bahwa tentang kegunaan sistem akuntansi keuangan yang meliputi faktor tingkat kepuasan pelatihan, tingkat pemahaman karyawan terhadap kejelasan tujuan dan tingkat pemahaman karyawan terhadap dukungan atasan masih terbilang kurang. Sehingga disitu peneliti tertarik untuk meneliti kembali tentang Faktor Keprilakuan organisasi dalam mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Dimana tempat yang dijadikan obyek adalah pada kabupaten Jember, yang mempunyai masalah karyawan sebagian banyak tidak mengerti atau tidak paham mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Oleh karena itu peneliti melakukan sebuah replikasi penelitian yang telah dilakukan (Kayati : 2016).

## 2. Metode

Jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data *primer*, data *primer* adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara yaitu melakukan penyebaran angket *kuesioner* yang berisikan beberapa pertanyaan yang dibuat oleh peneliti dan akan diserahkan kepada responden, sedang jenis penelitian yang digunakan dalam peneitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis. Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui

pengukuran variable dengan angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistic dengan bantuan program SPSS.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil pada pegawai yang berprofesi akuntansi atau pada bagian bandahara/administrasi dimana objek yang akan diteliti adalah dinas – dinas kabupaten Jember dan kecamatan yang ada di kabupaten Jember. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Jember meliputi 21 Dinas, 31 Kecamatan, 6 Badan, 3 RSD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat. Jadi total sampel SKPD yang akan dijadikan sampel penelitian ini berjumlah 53 SKPD dinas dan kecamatan dengan total 106 kuesioner/angket.

Sampel pada penelitian ini diambil dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewenangan bagian keuangan dan administrasi pada Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 61 orang/responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *non probability sampling* dengan teknik *purpose sampling*. *Purpose sampling* atau pengambilan sampel bertujuan mendapatkan informasi yang relevan. Seseorang diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada masing – masing Dinas dan Kecamatan. 2) Memiliki kerja minimal 1 tahun pada periode penyusunan laporan keuangan.

Metode pengambilan data melalui angket atau kuesioner. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data variabel kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, pelatihan, kejelasan tujuan dan dukungan atasan satuan kerja perangkat daerah antar kecamatan dan kantor dinas kabupaten Jember. Karena data diolah dengan SPSS maka diperlukan uji instrument. Uji instrument yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Dapat dikatakan reliabel apabila jawaban responden atau seseorang tersebut adalah konsisten dari waktu ke waktu.

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistic deskriptif dan analisis regresi berganda.

#### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Abdiel : 2015) analisis statistik deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisis statistic deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran dari nilai minimum, nilai maksimum, rata – rata (*mean*), dan standar deviasi dari masing – masing variabel penelitian yaitu kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah (Y), pelatihan (X), kejelasan tujuan (X2), dukungan atasan (X3).

#### 2. Analisis Regresi Berganda

##### a. Uji asumsi klasik:

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Ghozali : 2011).

##### b. Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan uji statistic non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S). dikatakan berdistribusi normal apabila nilai probabilitasnya  $>0,05$ .

##### c. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris dapat dilihat pada output SPSS dalam kolom Linearity pada ANOVA Table pada taraf signifikansi 0,05.

##### d. Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai  $R^2$  yang menghasilkan suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel – variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matrik korelasi antar variabel – variabel independen. Jika ada korelasi yang cukup tinggi maka model regresi tersebut multikolinieritas.
- 3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Varianc inflation factor*). Jika nilai VIF lebih besar dari 1 dan kurang dari 10 sedangkan toleransinya kurang dari 1 maka model regresi tidak mengandung multikolinieritas.

##### e. Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Kayati : 2016). Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melakukan Uji Park. Jika koefisien parameter variabel independen atau nilai signifikansinya $>0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Abdiel : 2015).

### 3. Hasil dan pembahasan

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil pada pegawai yang berprofesi akuntansi atau pada bagian bendahara/administrasi dimana objek yang akan diteliti adalah dinas – dinas, dan kecamatan yang ada di kabupaten Jember. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Jember meliputi 21 Dinas, 31 Kecamatan, 6 Badan, 3 RSD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Bagian, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat. Jadi total sampel SKPD yang akan dijadikan sampel penelitian ini berjumlah 53 SKPD dinas dan kecamatan dengan total 106 kuesioner/angket. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien Alpha yang cukup atau memenuhi kriteria untuk dikatakan reliabel yaitu di atas 0,600, sehingga untuk selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Standart alpha 0,600 menurut teori yang bersumber dalam bukunya (V. Wiratna Sujarweni : 2014) yang menjelaskan bahwa nilai Cronbach Alpha > 0,600 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten. Hasil uji normalitas ternyata semua data terdistribusi secara normal, sebaran data berada di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Dari hasil uji heterokedastisitas yang telah dilakukan ternyata titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas pada model regresi yang dibuat, dengan kata lain menerima hipotesis homoskedastisitas.

Pengujian Hipotesis uji F menyatakan bahwa bahwa  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (17,869 > 2,4626) maka pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah pada tingkat signifikan 5%, dalam hal ini  $H_0$  ditolak. Sehingga, hipotesis yang menyatakan pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah terbukti kebenarannya (Ha diterima). Sedangkan uji t menyatakan bahwa pelatihan mempunyai nilai signifikansi hitung sebesar 0,040 dan lebih besar dari 0,05 dan t hitung (2,077) > t tabel (1.6602) yang berarti bahwa hipotesis pelatihan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah diterima. Hal ini juga menunjukkan bahwa pelatihan mempengaruhi sistem akuntansi keuangan daerah yang berarti semakin baik pelatihan akan berdampak pada semakin baiknya sistem akuntansi keuangan daerah. Hasil uji kejelasan tujuan mempunyai nilai signifikansi hitung sebesar 0,010 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,611) > t tabel (1.6602) yang berarti bahwa hipotesis kejelasan tujuan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah diterima. Hasil uji dukungan atasan mempunyai nilai signifikansi hitung sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (4,670) > t tabel (1.6602) yang berarti bahwa hipotesis dukungan atasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah diterima.

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,587. Hal ini berarti 58,7% variasi variabel sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan oleh pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan, sedangkan sisanya sebesar 0,413 atau 41,3% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini seperti kompetensi SDM dan lainnya.

#### a. Pengaruh pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh pelatihan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,040 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,077) > t tabel (1.6602) yang berarti hipotesis diterima.

#### b. Pengaruh kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,010 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,611) > t tabel (1.6602) yang berarti hipotesis diterima.

#### c. Pengaruh dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,005 dan lebih kecil dari 0,05 dan t hitung (2,842) > t tabel (1.6602) yang berarti hipotesis diterima. Pengujian secara statistik ini membuktikan bahwa adanya pengaruh dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

#### d. Pengaruh pelatihan, kejelasan tujuan, dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

Hasil pengujian hipotesis dari ketiga variabel tersebut telah membuktikan bahwa pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan berpengaruh secara simultan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh taraf signifikansi sebesar

0,000 dan lebih kecil dari 0,05 dan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $17,869 > 2,4626$ ) yang berarti hipotesis diterima. Artinya bahwa ada pengaruh secara simultan pelatihan, kejelasan tujuan, dan dukungan atasan terhadap sistem akuntansi keuangan daerah.

#### 4. Simpulan dan Saran

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1) Terdapat pengaruh pelatihan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik pelatihan mengenai kegunaan sistem akuntansi keuangan yang diberikan maka dapat memberikan peningkatan dalam kegunaan SAKD. 2) Terdapat pengaruh kejelasan tujuan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik kejelasan tujuan yang diberikan maka akan dapat memberikan peningkatan terhadap kegunaan SAKD. 3) Terdapat pengaruh dukungan atasan terhadap kegunaan SAKD. Artinya, semakin baik dukungan atasan yang diberikan maka akan dapat memberikan peningkatan terhadap kegunaan SAKD.

#### Daftar Rujukan

- Abdiel Janitra, 2015, *Pengaruh Faktor Kepriilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 6-7.
- Ahmad AL-Hiyri, Mohammed Hamood AL-MAshregy, Nik Kamariah Nik Mat, Jamal Mohammeds mail alekam, 2013, "Factors That Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality A Survey in University Utara Malaysia", *American Journal of Economis*. Vol 3. P 27-31.
- Ahmad Nur Solichin, 2015, *Pengaruh Faktor Kepriilaku Organisasi Terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Grobongan Jawa Tengah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Andira Dewanti, 2015, *Pengaruh Faktor Kepriilaku Organisasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Kabupaten Ngawi*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 5.
- Ataina Hidayati, 2002, "Perkembangan Penelitian Akuntansi Kepriilaku Berbagai Teori Dan Pendekatan Yang Melandasi", *Jurnal Akuntansi*, V6 No 2.
- Caecilian Henny Setya Wati, Samuel Batlajery, 2015, "Faktor Kepriilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*, Vol 6 No 1.
- Cyntia Carolina, 2013, *Pengaruh Kejelasan Tujuan Dan Dukungan Atasan Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Skripsi Akuntansi Universitas Negeri Padang. 3, 5.
- Erwinton Putra Antonius Tarigan, Lastria Nurtanzila, 2013, "Standar AKuntansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol 17 No.1. 30-33.
- Febriana F. Albugis, 2016, "Penerapan Sistem AKuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabel Keuangan Pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Emba*. Vol 4 No 3.
- Kayati, 2016, *Pengaruh Faktor Kepriilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, Skripsi Fakultas Akuntansi Universitas Negeri Semarang.
- Lyna LATifah, Arifin Sabeni, 2007, "Faktor Kepriilaku Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah", *Simposium Akuntansi*. ASPP-13. 6-7.
- Muji Mranani, Beti Lestiorini, 2011, "Faktor Kepriilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Konflik Kongnitif Dan Konflik Afentif Sebagai Intervening", *Jurnal Ekonomi*. Vol 10 N0.3.

- Novie Astuti, 2017, "Pengaruh Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kota Kediri Jawa Timur", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 6 No 1. 21.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Prosedur Sistem Akuntansi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Akuntansi Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor . 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Jabatan PNS.
- Sigit Indra Lesmana, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib DI Indonesia, Penulisan Tesis, Universitas Sebelas Maret 2010.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pusat dan Pemerintahan Daerah Republik Indonesia.
- Tan Ming Kuang, See Tin, 2010, "Analisis Perkembangan Riset Akuntansi Keprilakuan Study Pada Jurnal Behavioral Research In Accounting", *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 No 2.
- Yulistia, Novi Yanti, Ika Purwasih, 2017, "Analisis Faktor Keprilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi SumateraBarat", *Jurnal Benevita*. Vol 2. 183.